PENINGKATAN PEREKONOMIAN RAKYAT DI KARESIDENAN REMBANG MELALUI PENGELOLAAN TERNAK TAHUN 1900-1942 (SUATU KAJIAN HISTORIS)

Rr. Sri Wahyu Sarjanawati
Jurusan Sejarah FIS UNNES

Abstract

Ranch as one of the community in supporting the economy Residency Rembang has received attention from the colonial government. It can be seen from one of the policies issued by the government at that time, the effort to develop the farm. Government's attention not only on livestock assistance, but also animal health itself. It can be seen from the legislation, regulations or policies issued by the government relating to the health of livestock. In this study the problems will be solved are: how the development of Animal Husbandry in Residency Rembang from 1900-1942, how the management of livestock in Rembang Residency in 1900-1942, and how the government efforts in improving the health of livestock in Residency Rembang from 1900-1942? This research uses historical method. The final stage is the preparation or compilation of historical writing that is the facts in a synthesis as a unified whole. The results showed that the growth of ranch increased Residency Rembang. The increase is not free from government interference. In the management of livestock can not be separated from the supervision and examination by the Department of Livestock Health. This was done to improve the quality of livestock. Prevention of disease in cattle infectious anticipated by the government passed legislation preventing infectious diseases and quarantine cattle.

Key words: Livestock, livestock management, livestock health

PENDAHULUAN

Peternakan merupakan salah satu penyokong perekonomian suatu daerah. Di samping itu, hasil-hasil dari ternak memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan masyarakat sebagai sumber protein hewani. Pada masa kolonial peternakan juga mendapat perhatian dari pemerintah saat itu. Hal itu selaras dengan Politik Etis yang dilaksanakan setelah berakhirnya masa liberal. Politik Etis diharapkan mampu memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh adanya depresi ekonomi pada tahun 1875-1895. Kebijakan yang dikeluarkan terdiri dari pendidikan, pembangunan sarana irigasi, riset dan perluasan pertanian, pengembangan peternakan dan perikanan, kredit pedesaan, industrialisasi, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Selain itu juga adanya perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa untuk menyeimbangkan jumlah penduduk dengan luas wilayah (Hartatik. 2004).

Burger menjelaskan (1970: 93-98) bahwa di Jawa pada tahun 1915 s.d 1920 ternak ada 40 ekor di setiap km² atau 15 ekor di setiap 100 jiwa. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur terdapat kelebihan ternak besar secara berturut-turut, yaitu: 20%, 37%, dan 49%. Di Jawa ternak di samping memiliki nilai sosial juga mempunyai nilai ekonomis yang besar, yaitu dalam pertanian, pengangkutan, disembelih, dan perdagangan ternak, daging atau kulit. Daerah-daerah yang memiliki peternakan besar di di Jawa yaitu Madura dan Rembang. Nilai lebih dari peternakan di Daerah Rembang adalah dekat dengan daerah perdagangan ternak dari Timur dan Barat, yaitu Kudus.

Peternakan sebagai salah satu pendukung perekonomian masyarakat di daerah Rembang telah mendapat perhatian dari pemerintah kolonial. Hal itu dapat dilihat dari salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu, yaitu upaya mengembangkan peternakan. Seperti di daerah Pangarasan (Tegal), pemerintah menyelenggarakan peternakan lembu jenis Benggala untuk di kirim ke daerah-daerah di Jawa dan Sumatera sebagai bantuan untuk meningkatkan peternakan di daerah tersebut. Di Karesidenan Blora pun pemerintah memberikan bantuan dengan mendatangkan lembu jantan jenis Onggole sebagai bibit (ANRI, 1977: 14-142). Semua bantuan di daerah-daerah tersebut sebagai upaya untuk mengembangkan peternakan sejalan dengan kebijakan Politik Etis. Perhatian pemerintah tidak hanya pada pemberian bantuan ternak saja, tetapi juga kesehatan ternak itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan ternak.

Pertanian merupakan mata pencaharian sebagain besar penduduk di Karesidenan Rembang, tetapi sektor yang lain yaitu peternakan juga menjadi mata pencaharian penduduk. Di lihat dari populasi ternak yang ada dari tahun 1920-1923 menunjukan bahwa peternakan cukup penting di daerah tersebut (lihat Tabel 1).

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa peternakan di Karesidan Rembang cukup besar dan merupakan salah satu kegiatan yang seharusnya mendapat perhatian sejak dulu. Peternakan merupakan salah satu penyokong kebutuhan makanan masyarakat, sehingga perlu mendapatkan perhatian yaitu kesehatan ternak Oleh karena itu kajian tentang peternakan dan kesehatan ternak di Karesidenan Rembang perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan ternak dan upaya pemerintah pada saat itu untuk menjaga kesehatan ternak, sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk kemajuan daerah Rembang dewasa ini.

Berdasarkan pada judul dan uraian di dalam pendahuluan di atas, dapatlah dirumuskan dua permasalahan berikut: (1) Bagaimana Perkembangan Peternakan di Karesidenan Rembang dari tahun 1900-

Tabel 1: Populasi Ternak di Karesidenan Rembang Tahun 1920-

Jenis Ternak	1920	1921	1922	1923
Kuda	8.773	8.084	8.642	8.636
Lembu	320.632	292.022	312.505	316.197
Kerbau	182.728	147.624	162.378	170.924

(Sumber: Memori Serah Jabatan 1921-1930, 1977: 58)

1942? (2) Bagaimana pengelolaan hasil ternak di Karesidenan Rembang pada tahun 1900-1942? (3) Bagaimana usaha pemerintah dalam meningkatkan kesehatan ternak di Karesidenan Rembang dari tahun 1900-1942? penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui Perkembangan Peternakan di Karesidenan Rembang dari tahun 1900-1942; (2) Mengetahui pengelolaan hasil ternak di Karesidenan Rembang pada tahun 1900-1942; (3)Mengetahui usaha pemerintah dalam upaya meningkatkan kesehatan peternakan di Kareseidenan Rembang dari tahun 1900-1942. Penelitian ini juga memiliki manfaat, yaitu: mengembangkan ilmu pengetahuan sosial, khususnya untuk mengungkap kondisi dan perkembangan peternakan khususnya di Rembang.

Sebelum melakukan penelitian kita harus tahu tentang apa itu peternakan, Karesidenan Rembang, dan Politik Etie. Peternakan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeliharaan, pengembangbiakan, pengolahan, serta pemanfaatan hasil ternak. Kegiatan ini juga mencakup penyediaan sarana dan prasarananya. Kegiatan peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan protein hewani.

Peternakan sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, karena ternak merupakan salah satu bentuk mata pencaharian. Peternakan dikenal sejak jaman prasejarah, setelah manusia bisa menjinakan binatang. Diperkirakan, binatang yang mula-mula diternakan manusia purba adalah jenis binatang pemakan rumput. Awalnya, manusia purba hanya menunggui, mengawasi, dan mengamati kawanan ternak, lalu menggiringnya menuju lahan rumput. Ketika peradaban manusia sudah lebih maju, manusia mulai berfikir tentang pembuatan kandang dan pemberian makanan bagi ternak peliharaan.

Mulai abad ke-19, peternakan dibagi dalam dua golongan besar. Pertama, peternakan setengah liar yakni mengumpulkan suatu jenis binatang sebanyak-banyaknya, lalu menjaganya agar tetap terawasi dan menyingkirkan musuh ternak, sambil menjaga keseimbangan jumlah ternak jantan dan ternak betina. Di sini mutu ternak tidak dihiraukan. Peternakan jenis ini mengambil cara ekstensifikasi. Kedua, pemeliharaan ternak dengan cara intensifikasi, yakni memilih bibit yang baik, lalu mengembangkannya di dalam kandang dan mengawasi mutu pakan dan kesehatan (Eni, 1994:205-206).

Binatang-binatang yang diternakan memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat yang memiliki. Jenis-jenis binantang ternak antara lain: sapi, kerbau, domba, kambing, babi, kuda, dan unggas. Pada abad ke-19 sapi pedaging yang paling banyak diternakan adalah sapi jenis Ongole. Pada waktu itu, sapi perah mulai dikenal di Indonesia, sapi perah diimpor dari Belanda dan Australia. Sapi Perah dari Belanda yaitu sapi Fries, kemudian dikawinkan dengan sapi lokal menurunkan sapi Grati (ENI, 1994: 206). Meskipun kegiatan peternakan bukan barang baru bagi Bangsa Indonesia, tetapi sampai tahun 1960-an hampir seluruh kegiatan peternakan diselenggarakan secara tradisional. Kegiatan hanya merupakan kegiatan sambil lalu dan tidak diusahakan secara sungguh-sungguh.

Di Indonesia tidak semua daerah memiliki lahan yang cocok untuk peternakan. Burger (1970: 91-98) menjelaskan bahwa daerah-daerah yang berpenduduk jarang dan sangat banyak turun hujan hampir tidak terdapat ternak. Sedangkan di daerah-daerah yang berpenduduk jarang, dan kering serta hutan yang mempunyai banyak tempat terbuka atau padang rumput, ternak dapat hidup dengan baik. Di daerah Nusa Tenggara, Sumbawa, Sumba, Flores, dasn Sulawesi Selatan terdapat banyak ternak karena daerah ini cocok untuk peternakan dengan sistem setengah liar atau ternak tidak dikandangkan (mencari rumput sendiri). Di Madura dan Rembang adalah daerah-daerah ternak yang berpenduduk rapat, tetapi daerahnya kering. Ternak di jawa hidup dari sisa-sisa pertanian. Suatu daerah yang memiliki banyak sisa pertanian (padi) akan memelihara ternak. Demikian juga semakin banyak palawija dihasilkan di suatu daerah, maka makin besar ternak yang dipelihara. Daerah Rembang dan Madura merupakan daerah ternak, karena daerah ini merupakan perdagangan ternak dari Timur ke Barat.

Hasil dari peternakan akan meningkat bila kesehatan ternak juga dijaga. Berbagai penyakit hewan ternak seperti *Pestis Bovina, Antrax, Septichaemia Haemorhagia,* dan sebagainya serta tempat untuk ternak pun perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu pemerintah perlu ikut campur dalam upaya menjaga kesehatan ternak.

Kondisi Rembang

Rembang merupakan sebuah Kabupaten yang terletak di pesisir pantai utara Jawa. Pada abad XIX, Kabupaten Rembang menjadi bagian dari Keresidenan Rembang yang termasuk salah satu daerah di Jawa yang berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Secara geografis, Keresidenan Rembang terletak di sebelah utara Pulau Jawa. Keresidenan Rembang lebih dikenal sebagai pesisir utara Jawa dengan cuaca yang tidak terlalu panas karena terletak pada 111æ%-111æ%30‘ Bujur Timur dan 6æ%30‘-7æ% Lintang Selatan.

Karesidenan Rembang di sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa, di sebelah barat berbatasan dengan Jepara dan Juwana, sebelah barat daya berbatasan dengan Keresidenan Semarang, sebelah timur dengan Keresidenan Surabaya, sebelah selatan dengan Keresidenan Madiun, dan di sebelah tenggara berbatasan dengan Keresidenan Kediri (Warto, 2001:16). Wilayah Keresidenan Rembang seluas lebih kurang 5.600 *pal* atau 8.400 km2 yang membujur 80 *pal* (120 km) dari timur ke barat dan 70 *pal* (105 km) dari utara ke selatan. Pada masa VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*), Keresidenan Rembang terbagi ke dalam lima wilayah Kabupaten, yaitu Tuban, Lasem, Pajangkungan, Rembang, dan Palo (Paulus, 1917:594). Beberapa tahun kemudian wilayah Karesidenan di seluruh pantai utara Jawa dihapus dan dibagi-bagi ke dalam beberapa *Prefecten*, yaitu wilayah yang memiliki pengawas daerah yang menggantikan tugas dan fungsi Residen.

Secara administratif, Karesidenan Rembang meliputi Kabupaten Rembang, Lasem, Tuban, Jipang, dan Blora yang memiliki beberapa distrik yang masing-masing dikepalai oleh Demang Polisi. Namun pembagian wilayah tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 1824 mengalami perubahan pembagian wilayah dengan penghapusan Kabupaten Lasem (Soedjadi , 2005:7).

Distrik-distrik di wilayah *Prefecten* Rembang yang kemudian diganti menjadi Keresidenan memiliki kondisi geografis yang hampir sama. Sebagian besar tanah di Keresidenan Rembang ditutupi oleh hutan jati dan pegunungan kapur utara atau Kendeng yang puncaknya merupakan gunung tertinggi di Rembang yaitu gunung Argopuro. Secara fisiografi, wilayah ini didominasi jajaran pegunungan kapur yang hampir mencapai sepertiga wilayah Keresidenan Rembang. Selain gunung Argopuro, di wilayah Keresidenan Rembang juga terdapat gunung-gunung yang tidak tinggi seperti gunung Butak dengan ketinggian ± 679 meter dan gunung Lasem yang memiliki ketinggian ± 806 meter. Selebihnya, wilayah Keresidenan Rembang merupakan dataran rendah (Suroyo, 2003:9).

Perubahan pembagian wilayah administrasi sudah dimulai pada tahun pada tahun 1800-1811 di mana Rembang, Juwana, Lasem dimasukkan dalam keresidenan Rembang. Kemudian pada tahun 1830 yaitu pada masa *kultuurstelsel*, Keresidenan Rembang juga mengalami perubahan wilayah. Pada awal abad ke 20, Keresidenan Rembang terdiri dari 4 wilayah Kabupaten yaitu Rembang, Tuban, Blora dan Bojonegoro (Kartodirdjo, 1977:LII-LXXI). Keadaan tersebut kembali mengalami perubahan pada tahun 1928. Pada kurun waktu tersebut, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora digabung dengan Grobogan menjadi Karesidenan Blora. Sementara Kabupaten Rembang masuk ke dalam Karesidenan Pati. Perubahan wilayah administrasi terjadi lagi ketika Bojonegoro, Tuban dan Gresik berada di bawah satu karesidenan Gresik dan masuk ke dalam wilayah Jawa Timur (Penders, 1984:3).

Wilayah Keresidenan Rembang terbagi menjadi dua bagian yaitu wilayah yang terletak di sebelah selatan dan utara sungai besar yaitu Bengawan Solo. Bagian sebelah selatan relatif lebih subur dibandingkan daerah di utara Bengawan yang tanahnya berkapur dan tertutup hutan jati. Tanah di sebelah utara berupa tanah kering, berbatu dan mengandung kapur sedangkan tanah di bagian selatan subur untuk pertanian karena sering terkena lumpur endapan banjir arus sungai. Namun demikian penduduk di kedua wilayah tersebut sama-sama berada dalam kemiskinan. Tanaman yang cocok untuk daerah Rembang hanya palawija karena dapat hidup di tanah kering dan sedikit tanaman padi yang ditanam di sawah tadah hujan. Selain sungai Bengawan Solo, Keresidenan Rembang juga diairi sungai Karanggeneng. Meskipun memiliki dua sungai besar yang memisahkan daerah-daerah di Keresidenan Rembang, namun persediaan air tidak pernah cukup sehingga sering terjadi kekurangan air (Bekking, 1986:5). Hal ini menyebabkan sungai lebih berfungsi sebagai penghubung wilayah pedalaman dan pantai.

Selain memanfaatkan sungai sebagai alat transportasi, di Keresidenan Rembang telah ada jalan-jalan besar dan kecil yang dibangun oleh Daendels yang berfungsi sebagai penghubung antara distrik yang satu dengan yang lainnya dan pengangkut hasil-hasil pertanian yang dijual ke luar daerah (Boomgard, 1989:37). Kondisi jalan-jalan tersebut masih buruk dan hanya cocok digunakan sebagai pengangkut barang-barang perdagangan termasuk kayu-kayu yang telah ditebangi. Secara keseluruhan keadaan alam di daerah ini tergolong sulit untuk daerah pertanian. Tanah-tanah pertanian di Keresidenan Rembang sebagian besar berupa tanah kering yang terdiri dari pekarangan atau halaman sekitar, tegal atau kebun, penggembalaan atau padang rumput, rawa-rawa, dan sebagian kecil lainnya berupa tanah sawah, tanah tambak, tanah pekarangan, dan tanah hutan yang belum mendapat pengairan secara permanen baik berupa pengairan teknis maupun pengairan ½ teknis.

Menjelang Akhir abad ke-19 di Jawa terjadi penurunan kesejahteraan (*mindere welvaart)*, hal ini disebabkan oleh kegagalan penduduk Jawa dalam meniru metode usaha Barat. Pemerintah kolonial melakukan upaya untuk mendorong usaha ekonomi penduduk pribumi. Pada awal aba ke-20, pemerintah Belanda merubah arah kebijakannya. Kebijakan baru untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat ini adalah "Politik Etis" (Wertheim, 1999:70)

Politik Etis atau dikenal pula dengan Politik Kemakmuran atau Politik Asosiasi adalah suatu haluan politik kolonial baru yang berlaku di tanah jajahan Hindia Belanda, yakni setelah Ratu Belanda melontarkan suatu pernyataan bahwa "negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi penduduk pribumi." Tujuan pokok politik kolonial baru ini adalah memperhatikan kemajuan dan perkembangan penduduk serta memperhatikan pengolahan tanah. Secara teoretis, sistem eksploitasi diganti dengan politik pengajaran yang maju (ENI, 1994: 314)

Munculnya Politik Etis bukanlah hadiah dari Ratu Belanda , tetapi hasil dari pergolakan politik dan berakar pada masalah kemanusiaan maupun keuntungan ekonomi. Banyak orang Belanda yang mendukung pemikiran untuk mengurangi penderitaan rakyat Jawa yang tertindas, sehingga kebijakan ini dapat digulirkan. Kebijakan yang dikeluarkan terdiri dari pendidikan, pembangunan sarana irigasi, riset dan perluasan pertanian, pengembangan peternakan dan perikanan, kredit pedesaan, industrialisasi, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Selain itu juga adanya perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa untuk menyeimbangkan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kebijakan ini mendapat sambutan dikalangan industrialis Liberal, yang mengharapkan ekspansi pasar mereka sebagai akibat dari meningkatnya kesejahteraan kaum sosialis dan konservatif di Belanda yang memandang ideologi liberal dengan ketidakpercayaan secara kritis. Sejak saat itu, pemerintah berupaya keras memberikan kontribusi positif bagi tercapainya kesejahteraan penduduk pribumi dengan berbagi cara. Suatu hal yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Ini merupakan era imperialisme (Burger, 1970: 70-80).

METODE PENELITIAN

Tahap awal penelitian adalah dengan

mengumpulkan sumber yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber-sumber itu dicari dan diperoleh dari kantor arsip di Semarang; perpustakaan-perpustakaan, seperti Perpustakaan Wilayah di Semarang dan Yogyakarta, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Hatta, Perpustakaan di Universitas Gadjah Mada, dan lain-lainnya.

Tahap selanjutnya, dilakukan kritik sumber, yaitu menilai keadaan sumber dan keotentikan sumber yang ditemukan, baik secara eksternal maupun internal. Kritik secara eksternal ialah suatu pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah untuk mendapatkan keotentikannya. Kritik secara internal pada intinya adalah menekankan pada aspek kedalamannya yaitu isi dari sumber untuk mengetahui kredibilitas dari sumber tersebut.

Setelah dilakukan kritik sumber, kemudian melangkah ke tahap interpretasi atau penafsiran data yang sudah diseleksi sebelumnya. Tahap yang terakhir adalah penyusunan atau penulisan sejarah yaitu penyusunan fakta-fakta dalam suatu sintesis yang utuh sebagai suatu kesatuan.

PEMBAHASAN

Perkembangan Peternakan di Karesidenan Rembang 1900-1942

Rembang merupakan salah satu Karesidenan di Jawa yang menjadi pusat peternakan pada awal abad ke-20. Pada Awal Abad tersebut Karesidenan Rembang memiliki wilayah Jepara, Rembang, Pati, Blora, dan Kudus. Daerah yang menjadi sentra ternak adalah daerah Sedan (Rembang), Ngawen (Blora), dan Semanding/Sumanding (Jepara). Dari Ketiga wilayah ini menghasilkan ternak seperti Kuda, lembu, kerbau, kambing, domba, dan babi. Hewan ternak yang utama adalah lembu. Pengembangan ternak di Karesidenan Rembang mendapat perhatian dari pemerintah Karesidenan Rembang, yaitu dengan upaya meningkatkan jumlah ternak dan kualitasnya, khususnya hewan ternak lembu. Hal itu dapat diketahui dari laporan Residen Rembang yang berupaya meningkatkan ternak di Rembang dengan

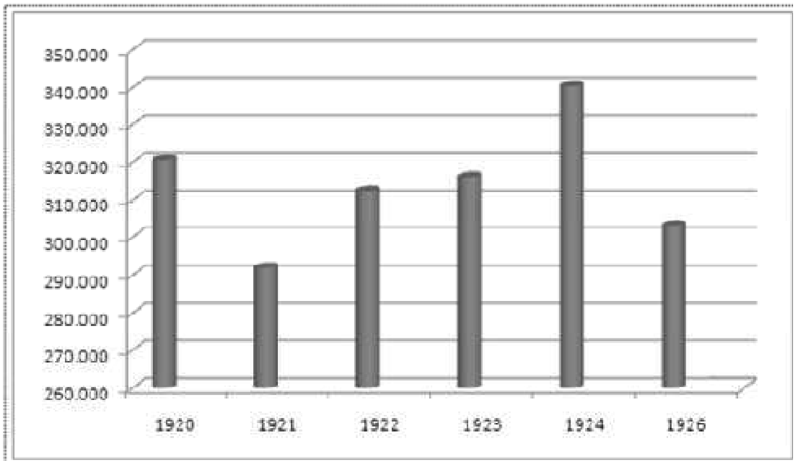

Sumber: *Memorie van Overgave 1921-1930 dan Nederlandsch-Indische Bladen voor Diergeneeskunde, no 39*

Gambar 2. Jumlah Ternak di Karesidenan Rembang Tahun 1920-1926 mendatangkan jenis lembu Onggole pada tahun 1922, dari Sumba sebanyak 35 ekor, dan Pekalongan sebanyak 34 ekor (23 lembu jantan dan 11 lembu betina). Selanjutnya pada tahun 1924 didatangkan lagi bantuan ternak lembu jenis Onggole dari Sumba , Mojokerto sebanyak 25 ekor, dan Rembang sendiri sebanyak 5 ekor. Bantuan ternak lembu ini didanai dari uang pinjaman kas desa yang ada di *afdeeling* Bojonegoro, yang akan dikembalikan dengan cara mengangsur dari hasil penjualan ternak. Hewan ternak yang didatangkan tersebut diserahkan kepada mereka yang menaruh minat untuk berternak lembu secara individu dengan dasar surat perjanjian hak kuasa yang ditetapkan pemerintah, setelah lembu dibayar lunas baru menjadi hak milik peternak lembu (*Memorie van Overgave*, 1921-1930: LVIII-LIX).

Usaha pengembangan ternak ini masih mendapat campurtangan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, karena peternak individu masih memerlukan bantuan pemerintah dalam mengembangbiakkan, mengelola hasilnya, dan perlindungan. Dari tahun 1920 sampai tahun 1926 jumlah hewan ternak lembu mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 1921 dan 1926 ada sedikit penurunan. (lihat Gambar 2).

Penurunan yang terjadi pada tahun1921 disebabkan harga daging dan kulit yang tinggi, sehingga para peternak menjual hewan ternaknya untuk disembelih. Sedangkan penurunan yang terjadi pada tahun 1926 disebabkan banyak ternak yang terkena penyakit.

Dalam upaya mengembangkan ternak di Karesidenan Rembang pemerintah juga memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi para peternak individu, yaitu dengan didatangkannya dokter hewan De Wilde. Adanya dokter hewan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesehatan ternak yang akan memberi keuntungan bagi peternak.

Pengelolaan Hasil Ternak di Karesidenan Rembang Tahun 1900-1942.

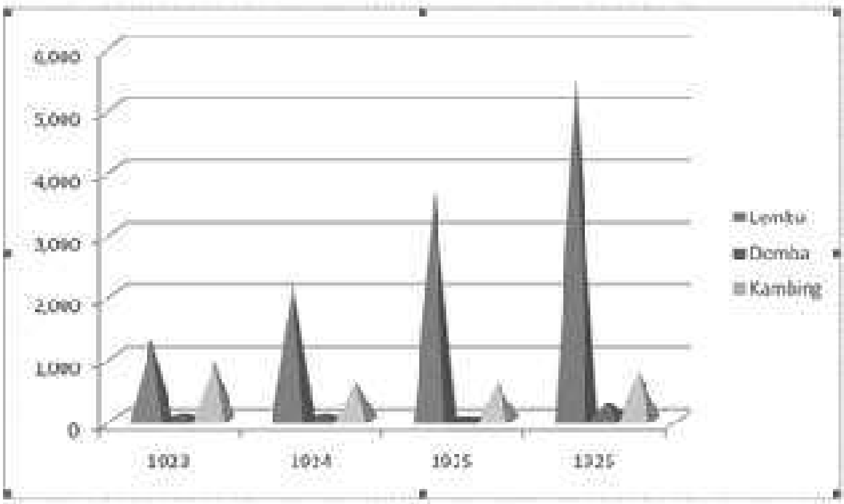

(Sumber: *Memorie van Overgave 1921-1930, LXXIII)*

Gambar 3. Jumlah Ekspor Ternak Dari Karesidenan Rembang Tahun 1923-1926

Hasil ternak di Karesidenan Rembang dijual diberbagai daerah, bahkan sampai dieksport ke luar negeri. Dari data yang ada dapat diketahui bahwa eksport lembu paling banyak , di samping domba dan kambing (lihat Gambar 3). Eksport ternak melalui laut dilakukan di Remang dan Tuban, sedangkan eksport melalui darat dengan kereta api dilakukan di Bojonegoro.

Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa perdagangan eksport ternak di Karesidenan Rembang cukup besar, khususnya lembu. Dari tahun 1923 sampai dengan tahun 1926 menunjukkan peningkatan yang besar. Perdagangan domba dan kambing mengalami pasang surut. Kondisi itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya beralihnya para peternak domba dan kambing ke ternak lembu, karena hasil ternak lembu lebih menguntungkan pada saat itu serta adanya bantuan dari pemerintah.

Perdagangan ternak merupakan mata pencaharian yang penting bagi penduduk di Karesidenan Rembang. Oleh karena itu usaha perdagangan ternak ini mendapat dukungan dari pemerintah. Pemerintah telah menyediakan pasar hewan yang baik dengan sarana dan prasarananya, di antaranya yaitu: kandang dengan segala fasilitasnya (tempat air minum ternak, tempat penjagaan), penginapan bagi pedagang, warung, dan penerangan jalan. Kecuali itu, pemerintah juga menetapkan harga ternak untuk menstabilkan perdagangan ternak dan peternak tidak dirugikan. Hal itu dituangkan dalam peraturan pemerintah yang diterbitkan pada *Staatblad* tahun 1912 n0 432.

Hasil dari peternakan di Karesidenan Rembang selain diperjualbelikan juga disembelih diambil dagingnya, penjualan susu ke perusahaan susu, dan diambil kulitnya. Penyembelihan ternak tidak boleh dilakukan sembarangan, harus dilakukan di tempat-tempat penyembelihan milik pemerintah daerah maupun milik swasta. Di Randublatung telah disediakan tempat khusus penyembelihan hewan. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap hewan yang disembelih sangat penting untuk menghindari penyembelihan ternak yang berpenyakit menular. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap lembu perahan pun dilakukan. Bahkan kandang, pegawai dan perusahaannya juga diperiksa dan diawasi, hal itu untuk mencegah penularan penyakit tuberculose. Sedangkan pemeriksaan pada susu hasil perahan belum dilakukan.

Pemerintah daerah juga melalukan pengawasan pada penyembelihan hewan untuk diambil kulitnya (penyamakan kulit). Setelah hewan ternak tersebut lolos dalam pemeriksaan, kulit yang akan disamak atau dikeringkan di cap. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyembelihan hewan secara gelap.

Kesehatan Ternak di Karesidenan Rembang Tahun 1900-1942

Pemerintah di Karesidenan Remang berupaya meningkatkan peternakan dan perdagangan hasil ternak semaksimal mungkin, diantaranya dengan memperhatikan kesehatan ternak. Pemantauan terhadap penyakit-penyakit ternak dilakukan secara teratur, seperti pada ternak lembu perahan. Pemeriksaan dilakukan dari hewan ternak, kandang, dan pegawainya, supaya penularan penyakit dapat dicegah.

Setiap ada hewan ternak yang datang dari daerah lain, hewan tersebut dikarantina terlebih dahulu. Pemeriksaan kebersihan pada hewan ternak dan kandangnya dilakukan secara teratur. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyembelihan hewan ternak di tempat- tempat pembataian milik pemerintah daerah mapun partikelir selalu dilakukan. Di desa Randublatung disediakan tempat penyembelihan hewan agar dapat dipantau penyembelihan hewan milik perorangan. Khusus ternak babi harus ditentukan letaknya sesuai dengan aturan pemerintah. Apabila babi diternakkan di luar daerah yang ditentukan harus meminta ijin khusus.

Sejak tahun 1878 telah dibuat undang-undang pengawasan ternak (*Staatsblad* 1878, no 1630). Undang –undang tersebut diperbaiki pada tahun 1892, 1893, 1897, 1901, 1902, 1903, 1904, 1906, 1908, dan 1912. Perbaikan itu disesuaikan dengan kondisi ternak pada saat itu dan diharapkan mampu mengawasi perdagangan, industri dan penyakit ternak. Kebijakan dinas kehewanan dalam melindungi ternask dari penyakit menular dituangkan dalam undang-undang ternak tahun 1912 bab 2 (dua) ayat 1-18, dan pelaksanaannya dalam besluit no. 39 tahun 1912 (*Staatsblad 1912, no. 432*) . Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Hindia-Belanda dalam menangani penyakit menular pada ternak, yaitu dengan karantina hewan. Semua ternak yang masuk maupun keluar daerah sentra ternak melalui laut harus mendapatkan ijin bebas karantina ternak. Daerah-daerah di jawa yang memiliki dan mengeluarkan ijin tersebut adalah Tandjong Perak, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Rembang, Soerabaja, an Pasoeroean.

Intruksi penanganan penyakit menular juga dikeluarkan oleh pemerintah dalam undang-undang tahun 1912 beserta pelaksanaannya pada *bestluit* no 39 tahun 1912. Para ahli masalah penyakit hewan di tempat di daerah-daerah tertentu seperti di Tandjong Priok, Tegal, dan Rembang. Penyakit-penyakit hewan yang sering menjangkiti hewan ternak seperti yang termaktub dalam *Staatblad* tahun 1912 No. 432/435 adalah: a) Penyakit pes pada ternak, b) Anthrax yaitu penyakit ternak yang diakibatkan oleh kuman, c) Septichaemia epizootica, yaitu pembusukan pada hewan, d) Aphtae epizootica, yaitu penyakit mulut dan kuku, e) Malleus, yaitu penyakit yang menyerang hidung biasanya menyerang kuda, f) Saccharomycose, g) Scabies yaitu penyakit kulit pada hewan, h) Surra, yaitu penyakit darah kuda yang sangat membahayakan, i) Dourine merupakan penyakit berbahaya yang pada saat itu belum dikethui penyebabnya dan cara menyembuhkannya. j) Piroplasmose, k) Tubercolose, l) Rabies yaitu penyakit anjing gila, m) Lymphingitis infectuosa yaitu penyakit infeksi pada limpa, dan n) Pleuro-pneumonia yaitu penyakit menular yang cukup sulit disembuhkan.

Dari empat belas penyakit yang banyak menjangkiti hewan ternak, di Karesidenan Rembang hanya empat buah penyakit ternak yang paling sering ditemui. 1) Aphtae epizootica, yaitu penyakit mulut dan kuku muncul setiap tahun tetapi di Karesidenan Rembang penyakit ini dapat dicegah. 2) Malleus, di Karesidenan Rembang hanya ditemukan di dua tempat yaitu di Kalitidu 2 ekor dan di Lasem satu ekor. 3) Surra, di Karesidenan Rembang penyakit ini pada walnya berjangkit pada beberapa lembu dan kerbau di dua desa. Agar tidak menular ke hewan yang lain, maka hewan yang terkena penyakit ini disingkirkan di kandang yang gelap. Pengawasan terhadap penyakit ini dapat dilakukan dengan mudah. Akan tetapi, di *onderdistrik* Jiken sukar dilakukan karena desa-desa di onderdistrik ini tersebar dan terpencil di tengah-tengah hutan. 4) Tubercolose, penyakit ini banyak menyerang lembu perahan. Lembu perahan yang terkena penyakit ini ada di perusahaan susu Lo Kasi Nio di Lasem sebanyak tiga ekor, dan di perusahaan susu milik Von Mengden di Blora sebanyak satu ekor. Di perusahaan susu lainnya pada umumnya baik dan terbebas dari TBC, karena mendapatkan vaksin tuberculine. Peraturan tentang ternak yang terkena tubercolose diterbirkan dalam *Staatsblad* tahun 1916 nomer 715.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah pada saat itu untuk memberantas penyakit menular pada hewan. Upaya mendatangkan ahli kehewanan seperti dokter hewan dan mantri hewan juga dilakukan. Di Karesidenan Rembang ada seorang dokter hewan, empat orang mantri kelas I, satu orang mantri, dan satu orang juru tulis. Setiap 3 bulan sekali mereka berkumpul di Rembang untuk bertukar pikiran dan saling member informasi. Sebelum tahun 1929, *Afdeeling* Kudus, Pati, Rembang, Demak, dan Blora menjadi satu resort dari Dinas Kesehatan Hewan.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 1900-1942, Karesidenan Rembang merupakan penghasil hewan ternak yang cukup besar. Hal itu didukung oleh keadaan alam daerah tersebut yang cocok untuk peternakan hewan (90% persawahan tergantung pada hujan). Seperti yang dikemukan oleh Burke bahwa Karesidenan Rembang adalah daerah-daerah ternak walaupun berpenduduk rapat, tetapi daerahnya kering. Bernagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatan hasil peternakan sebagai salah satu penunjang perekonomian rakyat khususnya dan Karesidenan Rembang umunya.

Jumlah ternak di Kareseidan Rembang mengalami pasang surut sesuai dengan kebutuhan ternak dan kesediaan ternak. Naik turunnya jumlah ternak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kebutuhan pasar, penyakit hewan, dan ketersediaan bibit hewan ternak. Pemerintah telah berupaya menyediakan bibit unggulan seperti lembu jenis Ongole dari luar daerah, agar kwalitas ternak dan jumlah ternak tercukupi.

Pengelolaan hasil ternak dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan. Beberapa perusahaan di Karesidenan Rembang mengolah daging, susu, maupun kulitnya, sedangkan pengelolaan milik perorangan sulit untuk dipantau. Agar hasil ternak memenuhi standar, pemerintah memeriksa dan mengawasi setiap kegiatan pengolahan hasil ternak. Daging misalnya, pemerintah memeriksa dan mengawasi pemotongan hewan dengan membuat peraturan pemotongan hewan. Di samping itu menyediakan rumah pemotongan hewan yang diawasi pemerintah daerah yaitu di Randublatung.

Banyaknya jenis penyakit menular pada hewan sangat mempengaruh kwalitas ternak. Oleh karena itu, pemerintah melalui Dinas Kesehatan Hewan mencoba menangani penyakit-penyakit hewan, khususnyya di Karesidenan Rembang adalah penyakit mulut dan kuku, malleus, surra, dan tuberculose. Upaya yang dilakukan oleh Dinas kesehatan adalah mengawasi dan mengobati penyakit ternak dengan mendatangkan dokter hewan dan mantri hewan. Hewan ternak yang terjangkit penyakit menular harus dikarantina. Di samping itu, pemerintah Belanda telah memberi peraturan untuk mengkarantina hewan yang masuk maupun keluar daerah, dan bagaimana menangani hewan yang terkena penyakit menular.

DAFTAR RUJUKAN

Arsip

Besluit van den Gouverneur-General van Nederlansch-Indie, 13 Agustus tahun 1912, nomer 39.

Besluit van den Gouverneur-General van Nederlansch-Indie, 16 Januari tahun 1913, nomer 46.

Memori Serah Jabatan Tahun 1921-1930 (Jawa Tengah). Arsip Nasional Republik Indonesia. Jakarta: 1977

Nederlansch-Indische Bladen voor Diergeneeskunde. Deel XXXIX. Uitgegeven door de Nederlansche-Indische Vereenigiong voor Diergeneeskunde. Archipel-Buitenzorg.

Staatsblad van Nederlansch-Indie. Nomer 110 Tahun 1893

Staatsblad van Nederlansch-Indie. Nomer 483 Tahun 1901

Staatsblad van Nederlansch-Indie. Nomer 432 Tahun 1912

Staatsblad van Nederlansch-Indie. Nomer 434 Tahun 1912

Staatsblad van Nederlansch-Indie. Nomer 435 Tahun 1912

Staatsblad van Nederlansch-Indie. Nomer 120 Tahun 1913

Staatsblad van Nederlansch-Indie. Nomer 714 Tahun 1936

Staatsblad van Nederlansch-Indie. Nomer 715 Tahun 1936

Buku

______________. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. 1994.Jilid 13 (PER-PY).